

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anand, Ghansham, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo.
- Adjie, Habib, 2011, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Revika Aditama, cetakan ke-1 Bandung.
- Arsana, Putu Jati, 2016, *Etika Profesi Insinyur: Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana Teknik*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hadi Sutopo, Ariesto, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Koentjoro, Diana Hakim, 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Tangerang.
- Lumban, G.H.S Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, cetakan ke-3, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mamudji, Sri., Rahardjo, Hang., Adrianto, Wahyu., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, Cetakan Kedua, Ikrar Mandiri abadi, Jakarta.

_____, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Datang*. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri 2002 *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Syamsudin. M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Situmorang, Viktor M., Sitanggang, Cormentya, 1993, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sigian, 2003, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

Adjie, Habib., 2005, *Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris* , Majalah Renvoi, No. 28, Th. III.

Edison, Dahlan, Ilyas Ismail, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2, No. 4, November 2014.

Hariss Abdul, Rizki Azalia Felda, *Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris di Kota Jambi*, Jurnal Lex Specialist Universitas Batanghari No. 22. DESEMBER 2015.

- Mirfa, Enny., 2016, *Perbandingan Hukum Jabatan Notaris di Indonesia dan di Negeri Belanda*, Jurnal Ilmiah Research Sains Vol. 2 No. 2. Juni 2016.
- Parsa, Wayan., Sarna, Kadek., Suharta, Nengah., 2015, *Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Rechtmatigheid) Majelis Kehormatan Dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Depansar.
- Sera Chandi Erari, Samuel, 2010, *Pelanggaran jabatan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat (Studi kasus akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Anugrah Tapin Persada)*, Tesis Program Magister Kenotariatan.
- Wiryomartani, Winanto, *Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris*, Makalah, disampaikan pada acara Kongres Ikatan Notaris Indonesia, pada tanggal 13-16 Juli 2005 di Makassar, Sulawesi Selatan.
- Yudara N.G, 2006, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok - Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Makalah, di sampaikan dalam rangka Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta: *Majalah Renvoi* Nomor 10.Th. III.

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2016, Lembaran Negara Nomor 180, 2016, diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2016.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembar Tahun 2014 Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kenotarisan Nomor. M. 0L.H.T.03.01 Tahun 2003,

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Jabatan Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara, UU Nomor.33 tahun 1954, Lembaran Negara Nomor.101 Tahun 1954. Tambahan Lembaran Negara Nomor.700, Pasal. 2.

Undang Undang Dasar 1945, Ps. 2 Aturan Peralihan.

Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03. AH. 01. 07. Tahun 2009.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015.

2. Belanda

Amendments to the Act on the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism as of 1 January 2013

Notariswet 1999 atau disebut pula *the 1999 Act* yang diatur pada *Notariswet* 1999 antara lain mengenai honorarium Notaris, perkumpulan Notaris dan tugasnya, pengangkatan Notaris, pendidikan dan pelatihan Notaris.

Act of 3 April 1999 containing the statutory rules governing the office of Notary.

Nederland Staatsblad Nomor.20 (Stb.1842, 20) tanggal 9 Juli 1842 tentang “*Wet op het Notarisambt*” (*Notariswet*) atau yang disebut pula undang-undang mengenai Notaris.

Undang-Undang Perancis yang dinamakan *Ventose Wet* (Undang-Undang Nomor 25 *Ventose* Tahun XI) yaitu sekitar tahun 1803 yang mengatur tentang *Loi organique du Notariat*.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Bestuursreglement bureau financieel toezicht, Staatscourant, nr. 57970, 2 november 2016)/peraturan administratif Kantor Pengawas Keuangan, Lembaran Negara, no. 57970, 2 November 2016.

D. Internet

Amendments to the Act on the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism as of 1 January 2013, <https://kvd1.com/news/amendments-to-the-act-on-the-prevention-of-money-laundering-and-financing-of-terrorism-as-of-1-january-2013/> diakses pada 18 November 2017, Pukul 16.55 Wib.

Dodi Oktarino, 2012, Perjalanan Sejarah Pengawasan Notaris, <http://www.dodioktarino.com/2012/05/perjalanan-sejarah-pengawasan-notaris.html> diakses pada tanggal 5 November 2017 Pukul 00.14 Wib.

Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie diakses melalui <https://www.knb.nl/english/about-knb/tasks> pada tanggal 5 November 2017, Pukul 00.24 Wib.

Wet-en regelgeving notariaat, diakses melalui <https://www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl/home> pada 18 November 2017, Pukul 16.50 Wib.

De Kamer voor Het Notariaat diakses melalui <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Oplossen-zonder-rechter/Tuchtrechtspraak/Paginas/Kamers-voor-het-notariaat.aspx> diakses pada tanggal 16 Februari 2018, pukul 20.00 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring/online diakses melalui <https://kbbi.web.id/preventif> pada tanggal 6 Februari 2016 pukul 01.19 Wib.

Universitas Leiden. <https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/bachelor/notarial-law> diakses pada tanggal 30 Maret 2018, pukul 11.01 Wib.

On the Boundaries of Phonology and Phonetics, diakses melalui <http://www.let.rug.nl/~gilbers/onderzoek/bundel/bundel2004ed2.pdf> pada tanggal 1 April 2018, pukul 2.31 Wib.

Faqih Lutfi, 2016, Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dan perbedaan kewenangannya dengan Majelis Pengawas Notaris, di akses melalui <http://www.calonsh.com/2016/10/14/keberadaan-majelis-kehormatan-notaris-dan-perbedaan-kewenangannya-dengan-majelis-pengawas-notaris> pada tanggal 5 Februari 2018, Pukul 11.16 Wib.

Dhyah Madya Ruth S. N., Majelis Kehormatan Notaris (Catatan Diskusi INC), Indonesia Notary Community (INC). diakses <http://www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/> pada tanggal 21 Februari 2018, Pukul 00.16 Wib.

Algemene wet bestuursrecht, diakses melalui <http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-01-01> pada tanggal 5 Februari 2013, pukul 14.17 Wib.

De Autoriteit Financiële Markten adalah Otoritas Keuangan (AFM). Diakses melalui <https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm> pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 20.31 Wib.

The Nederlandsche Bank adalah bank sentral Belanda. Diakses melalui <https://www.dnb.nl/en/home/index.jsp> pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 20.38 Wib.

De Belastingdienst adalah Administrasi Pajak dan Bea Cukai adalah pengumpulan pajak dan layanan bea cukai pemerintah Belanda. Diakses melalui

<https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home>

pada tanggal 5 Februari 2018, pukul 20.45 Wib.

De Kansspelautoriteit adalah Otoritas Gaming, sebagai regulator di pasar untuk permainan peluang, Diakses melalui <https://www.kansspelautoriteit.nl/> pada tanggal 5 Februari 2018, pukul 21.00 Wib.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) adalah organisasi pengacara berbadan hukum, Diakses melalui <https://www.advocatenorde.nl/> pada tanggal 5 Februari 2018, pukul 21.10 Wib

Situs ini dapat diakses melalui laman <https://www.notaris.nl/homepage> diakses pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 08.40 Wib.

Database Pusat Daftar wasiat yang dikenal dengan sebutan: *The European Network of Registers of Wills Association/Platform ARERT*. Dapat dikunjungi melalui <http://www.arert.eu/> diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 19.00 Wib.